

## ABSTRAKSI

Skripsi ini mengkaji tentang kebijaksanaan ekonomi dan penerapan otonomi daerah tingkat II Asahan menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974.

adapun kebijakan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan oleh daerah ini untuk menggali potensi sumber daya ekonomi daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari dinas-dinas, hasil dari BUMD dan hasil-hasil lain yang sah menurut Undang-Undang. Tujuan dari pengelolaan sumber-sumber ekonomi tersebut adalah agar daerah mempunyai penghasilan yang diperuntukkan oleh pembiayaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Karena keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tingkat II ditentukan oleh kemampuan daerah untuk membiayai anggaran rutin dan anggaran pembangunan dari kontribusi pendapatan asli daerah.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis yang dilakukan dengan cara, studi dokumentasi dan berupa wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten dan mengetahui permasalahan penelitian, seperti Kepala Daerah Tingkat II Asahan, Ketua Bappeda, Kepala Dinas Tingkat II Asahan, Bendaharawan Setwilda Tingkat II Asahan dan para Ketua Komisi di DPRD, yang sesuai dengan judul dari skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan ekonomi untuk pengelolaan pendapatan asli daerah adalah masih tergolong rendah, namun dengan demikian APBD

Kabupaten Asahan selama 5 tahun anggaran mengalami kenaikan. Melihat fakta-fakta di lapangan maupun pada saat wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten yaitu tidak mungkin daerah tingkat II dapat melaksanakan otonomi daerah tingkat II, karena terlalu besarnya campur tangan pemerintah pusat dan pemerintah tingkat II dalam pembangunan di daerah masih sangat dominan. Hal ini berarti penerapan otonomi daerah tingkat II Asahan belum terlaksana dengan efektif.

